
PEMBINAAN KELOMPOK UMKM DI KABUPATEN SUMEDANG

Edi Setiawan^{*1}, Diana Gustiana Nur'alfiati², Dicka Sunandar Putra³, Muhamad Firmansyah⁴, Nu'aini Siti Hasanah⁵, Oktavia Drupada⁶, Ujang Mulyana⁷
1,2,3,4,5,6,7 Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Maret 25, 2024

Revised April 22, 2024

Accepted Mei 30, 2024

Keywords:

Public Administration

Human Resources

Group Development

ABSTRACT

This research aims to find out how MSME development is carried out in the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry in Sumedang Regency, what factors hinder it and efforts to overcome the obstacles. The research method used in the research is qualitative methodology with four research informants. The data collection techniques used were literature study and field study consisting of observation, interviews and documentation. Meanwhile, the processing procedures in this research are data reduction, data presentation, data verification and data triangulation. Based on the research results, it was concluded that the development of MSMEs in the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry in Sumedang Regency can be said to be quite good, but there are still several obstacles. This occurs because of obstacles such as difficulties in the process of coaching employees and MSME actors, the arrangement of resources is not yet optimal, because it is seen from age limitations which affect the capabilities of human resources (HR) so that they do not match the abilities needed to form a team with the aim of to socialize the coaching that has been carried out, in efforts to improve the implementation of MSME coaching at the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry, Sumedang Regency, the government should continue to carry out analysis, routine evaluation and supervision of coaching so that employees' needs continue to be monitored.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Edi Setiawan

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang

Email: edi_setiawan@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Salah satu organisasi Pemerintahan tingkat daerah yang berwenang menyelenggarakan Pemerintahan umum diwilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertical yaitu organisasi Pemerintahan tingkat Kabupaten atau Kota. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebuah instansi yang berada di Kabupaten Sumedang memiliki peranan yang sangat penting kedudukannya, berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah para dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Bidang UMKM pada dinas Koperasi UMKM Perdagangan Perindustrian Kabupaten Sumedang bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas para pelaku usaha di daerah, maka dari itu bidang UMKM lebih fokus dalam menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki para pelaku usaha dengan melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pelatihan dalam berbagai kegiatan, sehingga para pelaku UMKM Kabupaten Sumedang siap bersaing.

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam hal ini, UMKM merupakan cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM mampu memperluas lapangan kerja untuk memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Mengingat peran UMKM yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu daerah maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Namun, kondisi UMKM di Kabupaten Sumedang saat ini terdapat kesenjangan.

Tabel 1. Kriteria Usaha UMKM

No.	Kriteria Usaha	Modal Usaha (Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	Hasil Penjualan Tahunan
1	Mikro	≤ Rp.1 Miliar	≤ Rp. 2 Miliar
2	Kecil	> Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Miliar	> Rp. 2 Miliar – Rp. 15 Miliar
3	Menengah	> Rp. 5 Miliar – 10 Miliar	> Rp. 15 Miliar – Rp. 50 Miliar

Sumber: Data Dinas UMKM kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel diatas, bahwa UMKM saat ini menyokong hampir setengah dari perekonomian di Kabupaten Sumedang namun UMKM belum sepenuhnya masuk ke dalam rantai perdagangan industri besar sehingga UMKM tidak berkembang dengan cepat, kebanyakan pemilik UMKM di Kabupaten Sumedang masih terbatas oleh modal, kemudian keterbatasan pengetahuan warga terhadap teknologi yang ada serta sulitnya memasarkan produk. Selanjutnya, permasalahan lainnya yaitu masyarakat mengeluhkan terkait legalitas.

Tabel 2. Jumlah UMKM Kabupaten Sumedang

No.	Jenis UMKM	Jumlah UMKM
1.	BPUM (Banpres produktif usaha mikro)	66.682
2.	SiUMKM (Website Kab. Sumedang)	13.368
3.	PL-KUMKM (Pendataan lengkap koperasi dan UMKM Kementrian)	44.557
4.	NIB (Nomor induk berusaha)	49.303

Sumber: Data UMKM Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel diatas, dari sekian diantara banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang mengeluhkan tentang sulitnya memasarkan produk karena minimnya gerai pemasaran yang disediakan pemerintah kabupaten setempat. Mereka kebingungan untuk menjajakan produknya, berbeda dengan kabupaten/kota lain yang memiliki outlet untuk pemasaran produk UMKM di setiap pojok wilayahnya seperti Purwakarta, Cirebon, Garut, Bandung, dan lain-lain. Minimnya outlet untuk memasarkan produk olahan itu menjadi kendala untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumedang.

Tabel 3. Data Legalitas UMKM

No.	Data	Jumlah
1.	UMKM yang sudah memiliki NIB	49.303
2.	UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal	3.710

Sumber: Data Dinas UMKM Kabupaten Sumedang

Permasalahan UMKM di Sumedang bukan hanya kesulitan dalam pemasaran, tetapi juga mengenai legalitas produk. Sampai saat ini, masih banyak pelaku UMKM di Sumedang yang belum mengantongi sertifikasi halal yang disebabkan oleh mahalnya biaya pembuatan sertifikasi halal. Sementara jumlah UMKM di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun UMKM telah berperan dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Besarnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional dan daerah khususnya di Kabupaten Sumedang, sudah sewajarnya para pelaku UMKM mendapatkan perhatian besar terhadap eksistensinya dalam penguatan ekonomi rakyat.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi- indikasi permasalahan yang menunjukkan bahwa pembinaan UMKM belum optimal karena terdapat beberapa kendala-kendala atau permasalahan yang peneliti temukan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, yaitu indikasi sebagai berikut:

1. Kemampuan Finansial UMKM rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pemahaman para pelaku UMKM dalam penerapan dan perencanaan tata kelola keuangan dalam menentukan modal usaha, keuntungan usaha dan pengeluaran usaha yang dilakukan saat produksi, sering kali masih banyak pelaku UMKM yang keuangan usahanya bercampur dengan keuangan pribadi. Untuk menangani hal ini pihak Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian melakukan pembinaan bagi para pelaku UMKM melalui seminar atau kegiatan pembinaan salah satunya dalam penerapan tata kelola keuangan yang baik.
2. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik ditingkat dinas maupun pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya sosialisasi dari pihak dinas dengan para pelaku UMKM sehingga banyak pelaku usaha yang masih kesusahan dan kebingungan dalam mengembangkan usahanya. Untuk menangani hal ini pihak dinas terus berbenah dan membantu para pelaku UMKM agar lebih baik dalam mengembangkan potensi dirinya dengan melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM.
3. Dukungan pemerintah dalam hal pemasaran produk hasil UMKM belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya hasil produk pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam memasarkan hasil usahanya. Untuk menangani hal ini pihak dinas berupaya memfasilitasi dengan mengadakan bazar UMKM namun itu juga kadang tidak menentu dalam mengadakan kegiatan tersebut.
4. Legalitas mahal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak para pelaku UMKM yang belum mempunyai legalitas, karena masih kesulitan dalam mengurus legalitas tersebut dan kadang masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mementingkan legalitas usahanya. Untuk menangani hal ini pemerintah membantu dan memberi keringan bagi para pelaku UMKM yang meminta surat rekomendasi dari dinas diberi keringan dalam membuat legalitas usahanya.

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti objek alamiah, dimensi peneliti adalah instrument sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono. 2016). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah Populasi, melainkan oleh Spandley (Sugiyono, 2013) dinamakan "Social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat, pelaku dan aktivitas, yang berinteraksi secara sinergis. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden tetapi sebagai narasumber, partisipan atau informan. Sehingga sasaran dalam penelitian ini, yaitu unsur- unsur yang terkait dengan Bidang UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Sumedang sebanyak 74 ASN.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Penentuan informan penelitian ini menggunakan purposive sampling, menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa *Sampling purposive* adalah teknik penempatan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Bidang UMKM	1
2.	Staf Fungsional Analisis Kebijakan Ahli	1
3.	Pelaku UMKM	2
	TOTAL	4

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016) yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi). Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2016), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang

Pembinaan merupakan suatu kegiatan yang tersusun, terencana, dimana setiap pelaksanaannya di arahkan pada penggerak dari organisasi itu sendiri, yaitu manusia dengan tujuan tertentu supaya apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien, di mana dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan proses yang diarahkan untuk membangun dan membuat menjadi lebih baik. Menurut Thoha (2016) "Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Pembinaan UMKM adalah suatu proses kegiatan melakukan perubahan para pelaku UMKM agar hasil menjadi lebih baik.

Pelaku UMKM menjadi arti yang sangat penting dalam pembinaan, mengingat pentingnya kegiatan pembinaan yang tidak akan berjalan jika tidak ada peserta yang diikutsertakan. Dengan adanya pelaku UMKM dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Pembinaan menunjukkan profesionalisme suatu bidang dalam dinas tersebut. Pembinaan menjelaskan proses pembinaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan untuk menjadi tujuan hasil yang maksimal. Sesuai dengan pernyataan menurut Widjaja (2017) menyatakan bahwa : "Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara perumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal."

Dalam pembinaan UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang merujuk pada dimensi-dimensi pembinaan menurut (Musaneff, 2001) yang mempengaruhi pembinaan itu ada 5 dimensi, yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pembangunan
- d. Pengembangan
- e. Pengarahan

Berdasarkan hasil, penelitian menunjukkan hasil keseluruhan pembinaan kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Penelitian Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang

No.	Dimensi	Rekapitulasi
1	Perencanaan	Perencanaan pembinaan pegawai dan pelaku UMKM belum baik, karena dilihat dari indikator kegiatan pembinaan yang belum terencana.
2	Penyusunan	Penyusunan Pembinaan pegawai dan pelaku UMKM belum baik dilihat dari belum berjalannya indikator laporan keuangan. Jadi, pihak dinas belum mempunyai pembukuan yang jelas mengenai omset dan permodalan UMKM.
3	Pembangunan	Pembangunan dalam pembinaan pegawai dan pelaku UMKM sudah berjalan dengan baik. Semua indikator terlaksana dengan baik.
4	Pengembangan	Pengembangan dalam pembinaan pegawai dan pelaku UMKM sudah berjalan baik. Semua indikator terlaksana dengan baik..
5	Pengarahan	Pengarahan dalam pembinaan pegawai dan pelaku UMKM sudah berjalan dengan baik. Semua indikator terlaksana dengan baik.

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan tabel di atas, Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang, secara keseluruhan pembinaan UMKM ini diketahui belum baik. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya. Hasil tersebut dapat dilihat dari segi perencanaan menunjukkan bahwa pembinaan pegawai dan pelaku UMKM untuk anggaran biaya dan kegiatan pembinaan belum terencana dengan baik. Penyusunan menunjukkan bahwa pembinaan UMKM belum baik. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya pembuatan laporan keuangan masih menjadi kesulitan baik dari pegawai maupun pelaku UMKM itu sendiri. Pembangunan menunjukkan bahwa pembinaan sudah baik. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasana sudah sangat mumpuni untuk kegiatan tersebut. Pengembangan menunjukkan bahwa pembinaan UMKM sudah baik. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya. Skill kelompok dan potensi sosial meningkat dengan adanya kegiatan pembinaan ini. Pengarahan menunjukkan bahwa pembinaan UMKM sudah baik. Melihat dari jawaban-jawaban informan dalam proses pelaksanaannya. Untuk koordinasi dan motivasi baik antar pegawai maupun dari pegawai kepada pelaku sudah berjalan dengan baik.

Sehingga dari seluruh rangkaian wawancara dan teknik pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan UMKM ini berjalan dengan cukup baik, mengingat masih banyaknya hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, dalam pembinaan UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan dengan maksimal. Peningkatan Pembinaan melalui acara non-formal dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi yang lebih *relax* agar para pegawai dan pelaku UMKM tidak jenuh dan dapat merefresh pikiran untuk berkembang lebih baik.

3.2 Faktor Penghambat Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang

Faktor adalah suatu keadaan yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu. Sedangkan penghambat adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu pekerjaan atau tujuan menjadi tidak lancar, lambat atau tahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu yang dapat menghambat berjalannya dalam mencapai suatu tujuan. Faktor penghambat dalam pembinaan ternyata memiliki pengaruh, melalui faktor ini dijadikan sebagai sarana yang membantu pelaksanaan pembinaan agar menghasilkan pembinaan yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam pembinaan UMKM dijumpai beberapa hambatan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Dikemukakan menurut (Suharno, 1993), mengemukakan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi pembinaan, yaitu:

- a. Faktor Internal
- b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan dari faktor penghambat dalam pembinaan kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Penelitian Faktor Penghambat Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang

No.	Dimensi	Hasil Penelitian
1	Faktor Internal	Adanya hambatan dalam pelaksanaan pembinaan pegawai dan pelaku UMKM faktor tersebut berasal dari dalam dinas dan pelaku. Dilihat dari indikator Sumber daya Manusia (SDM) yang masih kurang.
2	Faktor Eksternal	Adanya hambatan dari faktor luar pegawai dan pelaku UMKM. Hal ini dilihat dari indikator kurangnya kegiatan sosialisasi langsung dari dinas kepada pelaku UMKM.

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan tabel di atas, Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang, secara keseluruhan pembinaan UMKM ini diketahui mempunyai hambatan. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya. Hasil tersebut dapat dilihat dari faktor internal menunjukkan bahwa pembinaan pegawai dan pelaku UMKM mengalami hambatan dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dan anggaran biaya yang belum terpenuhi. Faktor Eksternal menunjukkan bahwa pembinaan UMKM terdapat hambatan. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya sosialisasi terhadap pelaku UMKM secara luas belum terlaksana.

Sehingga dari seluruh rangkaian wawancara dan teknik pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan UMKM ini terdapat beberapa hambatan, mengingat masih banyaknya hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Terjadinya hambatan-hambatan tersebut akan menghambat pembinaan UMKM tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam pembinaan UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang perlu diadakan upaya yang mungkin tidak akan sempurna dalam mengatasi hambatan tersebut, setidaknya sudah diusahakan dengan sebaik mungkin.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang

Pembinaan dapat dikembangkan atau ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian. Pembinaan yang dilaksanakan Dinas bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan pengarahan terhadap pelaku usaha, adanya pembinaan pelaku usaha bisa berwirausaha dengan baik dan sesuai dengan prosedur UMKM.

Dilihat dari segi pelaksanaan pembinaan masih terdapat hambatannya. Untuk itu, peneliti menggunakan dimensi-dimensi yang dikemukakan menurut Suharno, (1993) yang telah disebutkan sebelumnya guna mengukur menggunakan indikator dari dimensi-dimensi tersebut apa saja yang menjadi upaya mengembangkan pembinaan yang dilaksanakan di Dinas Kopersi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Upaya yang dikemukakan antara lain sebagai berikut.

- a. Faktor Internal
- b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan dari upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Penelitian Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang

No.	Dimensi	Rekapitulasi
1	Faktor Internal	Upaya yang dilakukan pihak Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian sudah melakukan upaya dengan baik mengatasi hambatan-hambatan yang berasal dari faktor internal pegawai dan pelaku UMKM.
2	Faktor Eksternal	Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mengatasi hambatan-hambatan dari faktor eksternal sudah berjalan baik bagi pegawai maupun pelaku UMKM.

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Berdasarkan tabel di atas, Pembinaan UMKM di Kabupaten Sumedang, secara keseluruhan pembinaan UMKM ini diketahui mempunyai upaya. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya. Hasil tersebut dapat dilihat dari faktor internal menunjukkan bahwa pembinaan pegawai dan pelaku UMKM dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan sudah berjalan dengan baik. Faktor Eksternal menunjukkan bahwa pembinaan UMKM terdapat upaya. Melihat jawaban-jawaban dari para informan dalam proses pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari peningkatan pegawai dan pelaku UMKM yang ada.

Sehingga dari seluruh rangkaian wawancara dan teknik pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan UMKM ini terdapat beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, mengingat masih banyaknya hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. Adanya upaya-upaya yang dilakukan dapat mengurangi kegagalan pembinaan UMKM yang dilaksanakan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pembinaan UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dikemukakan oleh Kepala Bidang UKM yang menjadikan pembinaan UMKM berjalan dengan baik.

4. CONCLUSION

Pembinaan kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa hal yang belum dilakukan seperti pada Dimensi Perencanaan mengenai pelaksanaan pembinaan masih berdasar pada permohonan UMKM, seharusnya disusun secara terjadwal selama satu periode berdasarkan anggaran yang diperoleh untuk jangka panjang. Kemudian pada Dimensi Penyusunan, Dinas tidak mempunyai data laporan keuangan mengingat para pelaku UMKM tidak menyampaikan laporan keuangannya untuk di evaluasi sehingga kemajuan UMKM sulit untuk diketahui.

Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang terdapat hambatan yang dialami, berasal dari dalam dinas dan pelaku UMKM berupa kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Rendahnya kemampuan tersebut dipicu oleh kurang baiknya dalam pelaksanaan pembinaan ke pelaku UMKM. Kemampuan perencanaan anggaran biaya dalam pembukuan laporan keuangan di dinas maupun pelaku UMKM masih kesulitan dan perencanaan anggaran biaya yang belum terencana dengan baik dalam proses pelaksanaan pembinaan.

Dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang, untuk mengatasi hambatan kurangnya sumber daya manusia Dinas Bidang UKM mengatasi dengan merekrut pegawai honorer atau sukwan walaupun sebenarnya hal ini merupakan kewajiban bagi ASN. Upaya selanjutnya dalam mengatasi hambatan kesulitannya dalam perencanaan pembukuan laporan keuangan, hal ini Dinas Bidang

UKM mengatasi dengan mengevaluasi setiap anggaran setelah dan sebelum dalam proses pelaksanaan pembinaan

REFERENCES

- Akadun (2011). *Teknologi Administrasi Negara*. Bandung. Alfabeta
- Akadun (2019). *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung. Alfabeta.
- Anggara (2012) *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung Pustaka Setia.
- Anggara (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Bintoro dan Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dimock & Dimock (1992). *Administrasi Negara*. Terjemahan. Jakarta. Rineka Cipta.
- Dimock and Dimock (1964). *Pubic Administration*. New York. Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Fathoni (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Rineka Cipta.
- Hasibuan. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Inu Kenca Syafiie dkk (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Komang Ariani, Ni. *Peran Dinas Koperasi UKM dalam Pemberdayaan UMKM Kabupaten Gianyar*.
- Kurnia, Windi. (2021). *Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang*. Skripsi. STIA Universitas Sebelas April Sumedang.
- Moleong, Lexy J, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung Maxmore. Pengertian UMKM menurut para ahli. <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm.html> Diunduh pada 30 desember 2018.
- Musanef. *Pemerintah Indonesia*. 2008. *Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta.
- Nazihah, Salma. (2021). *Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang)*. Skripsi. FISIP Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta